

Pendidikan Keaksaraan Fungsional Berbasis *Gender Mainstreaming* Dalam Peningkatan Kemandirian Perempuan Pedesaan

Oleh:

Deditiani Tri Indrianti, S.Pd., M.Sc*

(Dosen Prodi PLS FKIP Universitas Jember)

Abstrak

Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang berupaya mengkaji potensi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan keaksaraan fungsional dan pemberdayaan perempuan. Penelitian diawali dengan memetakan peran dan fungsi organisasi masyarakat yang memberi ruang untuk meningkatkan keberdayaan perempuan berdasarkan kebutuhan praktis dan strategis gender. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan *mix metode* yaitu menggabungkan *metode deskriptif eksplanatif* yang dilengkapi dengan survey, untuk kemudian dianalisa dengan teknik *Gender Analysis Pathway*. Temuan yang diperoleh dari hasil penelitian menggambarkan, bahwa pendidikan keaksaraan fungsional merupakan salah satu proses pemberdayaan yang dilakukan secara bertahap melalui jalur pendidikan non formal. Selain itu, kegiatan pendidikan keaksaraan tidak dapat dilakukan secara general melainkan disesuaikan dengan karakteristik sosial budaya lokal. Oleh karena itu, perlu adanya identifikasi organisasi masyarakat yang selama ini berperan sebagai penyelenggara pendidikan keaksaraan fungsional untuk kemudian dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai model pendidikan keaksaraan guna memberdayakan masyarakat. Mengingat organisasi masyarakat merupakan sebuah lembaga yang diinisiasi oleh masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci: *Pendidikan keaksaraan, pemberdayaan perempuan, organisasi masyarakat.*

I. PENDAHULUAN

Sampai saat ini, Pendidikan non formal masih dianggap residu, sedangkan pendidikan formal mendapat legalitas penuh dari pemerintah maupun masyarakat. Di sisi lain banyak masyarakat yang belum mendapat layanan pendidikan formal, karena faktor finansial dan sosial budaya yang berkembang dalam masyarakat. Akibatnya, angka buta aksara kian meningkat, sehingga kemampuan masyarakat dalam mengakses sumber-sumber kehidupan relatif rendah, karena ketrampilan (*life skill*) yang dimiliki kurang memadai.

Selain itu, proses pendidikan formal yang diyakini sebagai "dewa penyelamat" belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Proses yang dilakukan masih berorientasi pada materi (*subject matter*) dan bersifat umum. Oleh karena itu pemerintah menetapkan pendidikan keaksaraan fungsional yang mengkombinasi kegiatan belajar calistung (membaca, menulis, berhitung) dan kegiatan fungsional secara konkrit. Pendidikan tersebut lebih banyak ditujukan kepada perempuan. Mengingat sebagian besar perempuan masih banyak yang belum mendapatkan layanan pendidikan formal secara optimal, sehingga buta aksara lebih banyak disandang perempuan dibanding laki-laki. Akibatnya, perempuan sering kali dihadapkan pada masalah kemiskinan karena keterbatasan pengetahuan serta minimnya kemampuan untuk merespon kondisi sosial budaya.

Namun demikian, upaya mengurangi kemiskinan melalui pendidikan keaksaraan fungsional sudah banyak diselenggarakan oleh organisasi kemasyarakatan ditingkat lokal guna meningkatkan kemandirian perempuan, maupun oleh masyarakat. Meskipun secara kuantitatif menghasilkan *out put* yang cukup tinggi, namun secara kualitatif keberhasilan organisasi masyarakat sebagai penyelenggara program belum maksimal. Dimana proses pembelajaran masih belum memberikan pengaruh yang signifikan pada kehidupan perempuan. Hal ini terbukti bahwa belum ada peningkatan kemandirian perempuan dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik. Oleh karena itu perlu model pendidikan alternatif dalam menyelenggarakan pendidikan keaksaraan fungsional yang lebih tepat dan sesuai karakteristik sosial budaya di tingkat lokal.

Mengingat, buta aksara dan ketidakberdayaan perempuan bukan lagi merupakan fenomena sosial, akan tetapi telah menjadi masalah kemanusiaan terkait kemiskinan. Untuk itu perlu kebijakan komprehensif dan menyeluruh yang dilakukan secara regional maupun nasional guna menyelesaikan akar penyebab masalah tersebut. Dimana melalui pendidikan akan melahirkan generasi yang kritis, kreatif, dan progresif. Dimana kesadaran kritis akan menghasilkan manusia yang mampu merespon situasi yang berpengaruh terhadap sumber-sumber kelangsungan hidup serta mampu melakukan pembacaan kondisi sosial disekitarnya. Pembacaan tersebut merupakan instrumen dalam memperbaiki kehidupan masyarakat. Bagi Freire, pendidikan tidak dapat dipisahkan dari upaya penyadaran, yang pada akhirnya bermuara pada pembebasan¹. Penyadaran tersebut diimplementasikan dengan menggali, mempertahankan dan mengembangkan modal sosial, termasuk kearifan lokal. Nilai-nilai sosial budaya, seperti kesetiakawanan sosial, wawasan kebangsaan, dan gotong royong, dioptimalkan sebagai modal dasar dalam menciptakan tanggung jawab sosial.

II. PEMBAHASAN

Pendidikan Keaksaraan Sebagai Upaya Kesadaran Kritis

Saat ini, Indonesia berada di ambang baru untuk keluar dari masalah kemiskinan akibat rendahnya sumber daya manusia melalui program pendidikan. Di mana format baru pendidikan lebih berorientasi jangka panjang dan lebih diarahkan pada proses peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat. Oleh karena itu pelaksanaan pendidikan perlu memperhatikan tatanan masyarakat yang telah terorganisir di tingkat lokal. Dalam hal ini pendidikan tidak lagi terdesentralisasi, melainkan terdistribusi secara fungsional. Kondisi ini merupakan perubahan besar untuk memperbaiki tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis.

Dimana Pendidikan Keaksaraan Fungsional mengkombinasikan kegiatan belajar calistung (membaca, menulis, dan berhitung), dan ketrampilan fungsional. Kombinasi tersebut bukan merupakan langkah baku yang harus diberikan secara

¹ Siti Murtiningsih, *Alternatif Pendidikan Freirean: Jalan Keluar Penindasan Terhadap Perempuan*. ()Hal. 21.

berurutan, tetapi diberikan secara simultan². Dimana proses pendidikan tidak bersifat teoritis semata. Melainkan sebuah proses yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara mendasar. Kegiatan pendidikan keaksaraan fungsional diharapkan mampu memberikan perubahan yang nyata terkait aspek sosial, ekonomi dan politik bagi perempuan. Pembelajar tidak hanya dapat membaca, menulis dan berhitung yang dibuktikan ijazah maupun sertifikat. Hal yang lebih mendasar adalah, bagaimana pembelajar mampu menfungsikan aksara yang telah diperolehnya untuk mengakses sumber-sumber kehidupan.

Mengingat sasaran pendidikan keaksaraan fungsional adalah orang dewasa, maka proses pembelajaran perlu dilihat, dianalisis, dan dipahami dalam kerangka penyadaran kritis³. Perubahan yang ingin dicapai adalah tumbuhnya masyarakat gemar belajar. Di mana terdapat perubahan dari situasi kehidupan masyarakat yang parsial menuju kehidupan yang berencana (*planning society*). Menurut Sudjana (2004: 279) ciri masyarakat belajar antara lain: *pertama*, masyarakat gemar mencari informasi yang berhubungan dengan kepentingan kehidupannya. *Kedua*, masyarakat gemar menemukan informasi baru melalui kegiatan membaca berbagai sumber. *Ketiga*, masyarakat gemar menulis dan menyampaikan informasi, dan *keempat* masyarakat gemar melakukan kegiatan belajar secara berkelanjutan atas kesadaran bahwa belajar tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat.

Pemberdayaan Perempuan dalam Pendidikan Keaksaraan Fungsional

Sebagai format baru pembangunan, pemberdayaan lebih memberikan kekuasaan kepada masyarakat untuk mengelola berbagai sumber daya. Sebagaimana dikatakan oleh Zubaidi (2007:15), bahwa keberpihakan terhadap nasib orang lemah dilakukan dengan mengubah model gerakan sosial dari kontrol sosial ke metode praktik yang mencoba memberdayakan dan melibatkan mereka

² Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Pendidikan Luar Sekolah Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Regional IV, *Model Penyelenggaraan Saka Bhakti Bina Aksara*, (Surabaya, 2007), hal. 1.

³ Paulo Freire. Pendidikan Politik Kebudayaan, Kekuasaan, dan Pembebasan. (Yogyakarta, 1999), hal. 34

dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program kemasyarakatan secara kolaboratif-partisipatoris.

Empowerment (pemberdayaan) hadir sebagai pendekatan pendidikan alternatif karena adanya dua premis mayor, yakni kegagalan dan harapan. Dikatakan oleh Friedmann dalam Wrihatnolo dan Nugroho (2007:59) bahwa model pembangunan ekonomi guna menanggulangi kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan mengalami kegagalan. Sementara itu, harapan muncul karena adanya alternatif-alternatif pembangunan yang memasukkan nilai demokrasi, persamaan gender, persamaan antar generasi, dan pertumbuhan ekonomi yang memadai. Kegagalan dan harapan bukanlah alat ukur dari hasil kerja ilmu sosial, melainkan lebih merupakan cermin dari nilai normatif dan moral. Untuk itu pemberdayaan masyarakat diawali oleh proses pendidikan.

Dari perspektif masyarakat, gagasan pemberdayaan muncul karena adanya pandangan pendidikan sebagai rangkaian upaya sadar untuk membebaskan masyarakat dari segala bentuk ketertindasan. Konsep tersebut sangat dipengaruhi oleh pemikiran Freire yang mengembangkan pendidikan pembebasan. Freire menyatakan yang terpenting bagi kaum tertindas adalah proses penyadaran (*conscientization*), dimana terdapat proses kesadaran kritis dalam diri individu tentang situasi lingkungannya, sehingga individu dengan kemampuan sendiri dapat mengendalikan lingkungan di sekitarnya (Amin:2005:158, Sukesu dalam Sugiarti:2003:188).

Pemihakan kepada kelompok masyarakat marjinal yang terabaikan harkat dan martabatnya sebagai manusia merupakan prinsip utama pemberdayaan. Hal itu dilakukan agar kelompok tersebut memiliki kekuatan tawar-menawar, yang berguna untuk mengubah posisinya (Mahardika:2006;57). Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa pemberdayaan bukan semata dilakukan untuk perbaikan kualitas hidup masyarakat jangka pendek dalam konteks ekonomi, tetapi secara strategis mengarah pada proses pemungkinan transformasi tatatan masyarakat yang lebih adil.

Berbeda halnya dengan teori pilihan rasional yang memandang aktor sebagai manusia yang memiliki tujuan, sehingga tindakannya merupakan upaya

mencapai tujuan. Dikatakan Ritzer dan Goodman (2005:394) bahwa terdapat dua unsur utama dalam teori ini, yaitu aktor dan sumber daya. Sumber daya merupakan sesuatu yang menarik perhatian dan dapat dikontrol oleh aktor. Menurutnya, hal tersebut terjadi karena pada dasarnya manusia selalu berperilaku rasional. Meskipun teori pilihan rasional berawal dari tujuan. Akan tetapi teori ini memperhatikan dua pemaksa utama tindakan yang dilakukan aktor.

Pertama adalah keterbatasan sumber daya yang berbeda dan akses yang berbeda terhadap sumber daya lainnya. Bagi aktor yang memiliki sumber daya besar, pencapaian tujuan relatif lebih mudah dibanding aktor yang memiliki sumber daya kecil. Dalam mengejar tujuan, aktor akan memperhatikan biaya tindakan, sehingga kemungkinan besar aktor mengurungkan niatnya untuk mengejar tujuan yang bernilai sangat tinggi. *Kedua* adalah lembaga sosial, aktor individual biasanya akan merasakan tindakannya diawasi oleh aturan yang melembaga. Di mana, terdapat seperangkat aturan yang membatasi tindakan individu dengan melaksanakan aturan main yang meliputi norma, hukum, dan aturan pemungutan suara secara sistematis (Wrihatnolo dan Riant: 2007:104). Keterbatasan sumber daya dan akses yang berbeda terhadap sumber daya akan menentukan keberdayaan masyarakat. Dimana hal tersebut dipengaruhi oleh organisasi masyarakat. Selain itu program pendidikan akan efektif jika dilakukan dengan cara melakukan penguatan kelembagaan, pemberian bantuan dana operasional, serta keberadaan *outsider* (pendamping) guna membantu masyarakat untuk menjalankan program pendidikan.

Realitas Ketimpangan Gender dalam Pendidikan

Paling tidak terdapat dua alasan bahwa pendidikan keaksaraan lebih banyak ditujukan kepada perempuan, antara lain: *pertama*, bahwa perbedaan jenis kelamin mengakibatkan ketidakadilan gender. Dimana perempuan memiliki keterbatasan untuk melakukan akses terhadap dunia pendidikan. Hal ini dapat terlihat dari data statistik yang selalu menunjukkan jumlah laki-laki yang mendapatkan layanan pendidikan formal lebih banyak dibandingkan perempuan. Akibatnya perempuan lebih banyak yang belum melek aksara dibandingkan laki-

laki. Kemampuan perempuan untuk mengakses sumber-sumber kehidupanpun relatif lebih rendah. Bahkan, seringkali perempuan melakukan pekerjaan yang tidak dibayar, akibat konstruksi sosial budaya masyarakat yang menempatkan perempuan untuk melakukan pekerjaan domestik.

Kedua, bahwa kurikulum yang dikembangkan pada pendidikan formal masih bias gender. Akibatnya, perempuan semakin dirugikan oleh layanan pendidikan. Bahkan, pendidikan formal di Indonesia masih belum menjawab kebutuhan praktis dan strategis gender secara spesifik. Seringkali materi pembelajaran yang diberikan semakin menegaskan ketidakadilan gender. Selain itu, kemiskinan merupakan faktor pemicu diskriminasi terhadap perempuan di bidang pendidikan.

Berdasarkan data yang telah disajikan menggambarkan, bahwa pendidikan keaksaraan fungsional telah mampu mengimplementasikan pengarusutamaan gender. Hal ini terlihat dari manfaat yang telah diperoleh warga belajar. Dimana perempuan telah mampu menentukan keputusan yang terkait dengan kehidupannya. Tingkat keberdayaan perempuan dapat dilihat dari kemampuan untuk mengakses layanan pendidikan.

Konsep yang dikembangkan dalam pendidikan keaksaraan fungsional pada dasarnya berprinsip pada: kemerdekaan, kesetaraan, humanisme, plurarisme dan transformatif. Oleh karena itu, melalui pendidikan keaksaraan fungsional, keberdayaan perempuan akan lebih meningkat. Selain itu, keberadaan perempuan untuk mengakses sumber-sumber kehidupan dan kemampuan untuk melakukan respon akan situasi yang ada disekitarnya setara dengan laki-laki. Mengingat rendahnya kemampuan perempuan diakibatkan oleh kurangnya layanan pendidikan. Dimana perempuan buta aksara memiliki nilai tawar yang rendah. Bahkan laki-laki belum menempatkan perempuan sebagai mitra kerja. Melainkan sebagai *konco wingking* (teman belakang) yang tidak dapat membuat dan menentukan keputusan.

Pelaksanaan pendidikan keaksaraan fungsional yang lebih memperhatikan aspek gender akan lebih memberikan warna bagi perkembangan pembangunan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia berkualitas. Mengingat,

masyarakat miskin dan bodoh disebabkan oleh masyarakat yang belum melek aksara. Dimana melek aksara merupakan faktor utama untuk mencerdaskan bangsa dari kebodohan dan keterbelakangan. Kelompok belajar yang tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa pendidikan keaksaraan fungsional telah peka gender. Meskipun, perempuan lebih mendominasi kegiatan pendidikan keaksaraan fungsional. Hal tersebut disebabkan oleh kecenderungan laki-laki yang mengalami buta aksara merasa malu untuk menjadi komunitas pembelajar.

Perencana pembangunan seringkali belum menyadari bahwa perempuan merupakan korban pertama dan utama kemiskinan yang diakibatkan oleh minimnya pengetahuan. Kondisi tersebut berawal dari kondisi sosial budaya masyarakat yang menempatkan perempuan ter subordinat. Dalam keluarga miskin, perempuan belum mendapat prioritas untuk mendapat layanan pendidikan formal. Kesempatan untuk berada pada pendidikan formal lebih banyak diberikan kepada laki-laki. Artinya, pada keluarga miskin kesempatan bersekolah didasarkan pada jenis kelamin. Bukan berdasar pada potensi yang dimiliki. Kondisi tersebut memberikan dampak kepada perempuan untuk menghadapi masalah kemiskinan.

Untuk itu, sistem pendidikan perlu dianalisis berdasarkan kebutuhan strategis gender. Di mana posisi dan peran perempuan seringkali terbatas, termarginal ataupun asimetris dibandingkan laki-laki. Porsi yang diberikan kepada perempuan relatif kecil dan tidak adil. Dikatakan dalam teori feminis bahwa ketidakadilan gender di masyarakat terjadi bukan hanya karena menempatkan laki-laki dan perempuan secara berbeda, tetapi juga timpang. Secara khusus perempuan jauh lebih sedikit memperoleh sumber daya material, status sosial, kekuasaan dan aktualisasi diri dibanding laki-laki. Di sisi lain, perempuan memiliki peran reproduksi, produksi dan pengelola masyarakat.

Ketimpangan gender dalam program pendidikan keaksaraan secara langsung mempengaruhi kesejahteraan perempuan dan keputusan dalam rumah tangga. Hal itu memberikan dampak yang tidak kecil pada investasi anak dan kesejahteraan rumah tangga (Anonim:2006;81). Secara rinci keberdayaan perempuan dapat dikaji dalam beberapa hal, antara lain;

Pertama, akses. Dimana porsi yang diberikan perempuan dalam pendidikan terbatas sehingga mempersempit ruang gerak perempuan dalam mengakses berbagai sumber daya yang berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan hidupnya. Akibatnya, produktifitas perempuan relatif lebih rendah dibanding laki-laki. Hal ini disebabkan adanya pemahaman bahwa peran perempuan hanya di wilayah domestik, sehingga perempuan tidak punya cukup waktu mengurus dan meningkatkan kemampuannya (Handayani dan Sugiarti:2008:24).

Kedua, Partisipasi. dimana keterlibatan perempuan masih belum terlihat maksimal dalam kegiatan pendidikan. Kondisi ini disebabkan oleh anggapan bahwa perempuan memiliki status lebih rendah dari laki-laki. Hal ini dilihat pada kondisi memprihatinkan yang melilit perempuan, yang mana perempuan masih dianggap memiliki status dan kedudukan yang rendah dalam kehidupan masyarakat.

Ketiga, Kontrol Sosial. Dimana perempuan memiliki kontrol sosial lebih kecil dibanding laki-laki untuk mencapai keserasian antara stabilitas dengan perubahan dalam masyarakat.

Keempat, kesetaraan. Perbedaan gender melahirkan ketidakadilan gender yang berbentuk: 1) *Stereotype*, yaitu pandangan negatif terhadap relasi gender yang menyebabkan ketidakadilan. Pandangan ini menyebabkan perempuan selalu dirugikan, misalnya perempuan memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pekerjaan terkait dengan pekerjaan domestik, sehingga ketika perempuan berada di ruang publik peran yang dimainkan tidak lebih merupakan perpanjangan tangan domestik. 2) *Subordinasi*, yaitu keyakinan bahwa kedudukan laki-laki dianggap lebih penting dan lebih utama. Nilai-nilai masyarakat yang membatasi ruang gerak perempuan mengakibatkan perempuan ditempatkan pada posisi subordinat. Hal ini menyebabkan perempuan sering mendapatkan ketidakadilan di lingkungan kerja. 3) *Marginalisasi*, yaitu proses peminggiran dan ketidakadilan perempuan akibat perbedaan jenis kelamin. 4) *Kekerasan*, yaitu bentuk kekerasan yang tidak hanya menyangkut fisik tetapi juga menyangkut psikis, sehingga laki-laki atau perempuan mengalami gejala emosional dan ketidaktenangan batin. 5) *Beban ganda*, yaitu bentuk diskriminasi dan ketidakadilan dalam menjalankan beban kerja antara laki-laki dan perempuan (Anomin: 2005; 34-35). Dari paparan di atas

tersirat bahwa perbedaan gender lebih banyak mengorbankan perempuan. Akibatnya, kesempatan perempuan untuk mengembangkan potensi cukup rendah.

Ketidakadilan atau ketimpangan gender oleh Fakih (1996: 35) disebabkan perbedaan laki-laki dan perempuan tidak hanya dilihat secara biologis (*nature*) tetapi lebih dilihat dari kepribadian yang ditentukan masyarakat (*nurture*), sehingga secara situasional perempuan dianggap sebagai makhluk lemah dan kurang mampu memenuhi kebutuhannya, laki-laki dianggap lebih kuat dan lebih mampu. Untuk mengkaji hal itu, maka para pakar mencoba menggali akar historis dan struktural dari ketidakadilan gender sebagai berikut:

Pertama, adanya dhikotomi maskulin/ feminim peranan manusia sebagai akibat dari determinisme biologis, seringkali mengakibatkan proses marginalisasi wanita;

Kedua, adanya dhikotomi peran publik/ peran domestik yang berakar dari syndrome bahwa peran wanita adalah di rumah pada gilirannya melestarikan pembagian antara fungsi produktif dan fungsi reproduktif antara pria dan wanita;

Ketiga, adanya konsep beban kerja ganda yang melestarikan wawasan bahwa tugas wanita terutama adalah di rumah sebagai ibu rumah tangga, cenderung menghalangi proses aktualisasi potensi wanita secara utuh; dan

Keempat, yaitu adanya syndrome subordinasi dan peran marginal wanita telah melestarikan wawasan bahwa peran dan fungsi wanita dalam masyarakat adalah bersifat sekunder (Tjokrowinoto, 2004; 59).

Pengarusutamaan gender pada pendidikan keaksaraan menjadi awal terbukanya ruang gerak bagi perempuan dan laki-laki untuk sama-sama melakukan gerakan sosial. PUG merupakan salah satu strategi yang dapat melihat semua aspek kehidupan dan peran perempuan, baik peran produktif maupun reproduktif. PUG dianggap paling dinamis untuk menciptakan keadilan, karena dapat menganalisa subordinasi perempuan dalam proses pendidikan dari sudut pandang relasi gender yang menguntungkan laki-laki dan perempuan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Kate dalam Peet (1999; 34) gender tidak lagi di asumsikan sebagai pengaturan prinsip utama dalam hirarkhi sosial. Hambatan PUG adalah ketergantungannya pada perubahan yang signifikan terhadap struktur sosial. Hal itu sulit, tetapi bukan tidak mungkin dilakukan melalui peran lembaga sosial yang telah tumbuh dan berkembang dalam bermasyarakat.

KESIMPULAN

Pendidikan keaksaraan fungsional merupakan salah satu layanan pendidikan yang diberikan pendidikan luar sekolah dalam rangka menanggulangi kemiskinan dan kebodohan akibat rendahnya akses masyarakat terhadap pendidikan. Mengingat sasaran program keaksaraan adalah orang dewasa, maka pendekatan yang digunakan dalam program tersebut bukan lagi pendekatan *pedagogie*, melainkan pendekatan *andragogie*. Dimana proses pembelajaran diberikan dengan prinsip bahwa orang dewasa memiliki pengalaman yang dapat digunakan sebagai sumber belajar. Tutor bukan sumber belajar, serta bukan pendidik. Akan tetapi tutor memiliki peran sebagai motivator untuk mengembangkan potensi warga belajar.

Pada pendidikan keaksaraan yang dilakukan diketahui, bahwa pendidikan dilakukan berdasarkan kebutuhan praktis dan strategis gender. Dimana dalam kegiatan pendidikan, kapasitas perempuan lebih meningkat. Selain itu, perempuan juga lebih memiliki keterampilan untuk dapat mengakses sumber-sumber kehidupan. Akibatnya, perempuan memiliki nilai tawar yang setara dengan laki-laki. Nilai tawar yang dimiliki perempuan dapat menjadi salah satu pondasi utama perempuan untuk dapat lebih membuat keputusan strategis terkait pilihan-pilihan yang terkait dengan kehidupannya. Dengan demikian, perempuan akan terlepas dari masalah kemiskinan, kebodohan, maupun ketidakberdayaan.

Selain itu, masyarakat memiliki kebiasaan berkelompok yang diwujudkan dalam bentuk berorganisasi, sehingga keberadaan organisasi tersebut berpotensi sebagai wadah untuk menyelenggarakan program keaksaraan. Mengingat keberadaan organisasi masyarakat merupakan organisasi yang diinisiasi oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun kebutuhan sosial. Keberadaannya diakui oleh masyarakat. Hal ini dapat menjadi salah satu model penyelenggaraan program keaksaraan yang berbasis organisasi lokal. Dimana organisasi tersebut dapat memainkan peran untuk mengembangkan potensi sumberdaya alam maupun sumber daya manusia sebagai modal penggerak pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin. 2005. *Kemandirian Lokal: Konsepsi Pembangunan, Organisasi, dan Pendidikan dari Perspektif Sains Baru*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama
- Andrijani. 2003. *Analisis Gender dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan. Dalam Perenpuan, Kemiskinan dan Pengambilan Keputusan*. Bandung. Akatiga.
- Cleves, J. 1996. *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Fakih, M. 2006. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Fakih, M. 1996. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Ife dan Tesoriero. 2008. *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Peet, R. 1999. *Theories of Development*. London. The Guilford Press.
- Mahardika, T. 2006. *Strategi Membuka Jalan Perubahan*. Yogyakarta. Pondok Edukasi.
- Peet, R. 1999. *Theories of Development*. London. The Guilford Press.
- Ritzer dan Goodman. 2004. *Teori Sosiologi Moder*. Jakarta. Prenada Utama.
- Soekanto, S. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Suharto, E. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strtegis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan sosial*. Bandung. PT Refika Aditama.
- Sulistiyani, A . 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta. Gaya Media.
- Sugiyanto. 2002. *Lembaga Sosial*. Yogyakarta. Global Pustaka Utama.
- Tjokrowinoto, M. 2004. *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- _____. 2005. *Pengarusutamaan Gender*. Jakarta. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan.

Wrihatnolo dan Nugroho. 2007. *Managemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta. Elek Media Komputindo.

Zubaidi. 2007. *Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta. Ar-ruzz Media Group.

